

**KETERGANTUNGAN MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA
KEPADA MALAYSIA¹
(STUDI KASUS : DESA BADAU, KECAMATAN BADAU,
KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT)**

Intan Permata Sari
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
Email: intanpermatasari1112@gmail.com

Abstrack :Issues concerning border areas are an interesting issue, especially when President Joko Widodo focuses on developing the 3 T (Outermost, Outermost, and Underdeveloped) region. So far, the border area has only been used as a fringe area that is not interesting to be studied. There is little attention given by the government to the border area because it is constrained by cost and not a priority of government development. Therefore, the border community can not depend its fate on the Indonesian government and exploit the ease of access to neighboring countries. This causes the level of dependence of Indonesian society on the border so great to neighboring countries. They are 'forced' to be able to live in the midst of limited and limited access and facilities. Almost all communities in the border region experienced similar things, including the Badau community in West Kalimantan.

Keywords: border areas, dependency, Badau, Kapuas Hulu, West Kalimantan, Indonesia, Malaysia, Lubok Antu

¹ Data dari tulisan ini merupakan bagian dari Skripsi Intan Permata Sari tahun 2013.

PENDAHULUAN

Masyarakat perbatasan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk berpindah kewarganegaraan. Tentu bukan tanpa sebab karena tingkat ketergantungan mereka cukup tinggi kepada negara tetangga. Kebutuhan-kebutuhan vital mereka dapatkan dari negara tetangga. Ini dikarenakan secara ekonomi lebih menguntungkan berbelanja kebutuhan hidup ke negara tetangga dibandingkan harus ke pusat kabupaten atau pusat provinsi yang memerlukan biaya lebih banyak dan waktu yang lebih lama.

Selama ini, masyarakat perbatasan jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kehidupan mereka terbatas pada akses transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah ketergantungan ini bisa dilihat dari banyak aspek, misalnya pada aspek kesehatan dan pendidikan. Kedua aspek ini masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga sehingga masyarakat perbatasan menganggap lebih baik untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan pergi mendapatkan akses kesehatan ke negara tetangga dibandingkan di negara sendiri. Selain fasilitasnya lebih baik, sekolah di Malaysia gratis bahkan

anak-anak mendapatkan peralatan sekolah, asrama, seragam, dan uang saku.

Begitu juga dengan aspek ekonomi. Masyarakat Indonesia di perbatasan jauh lebih kekurangan dibandingkan dengan masyarakat Malaysia di perbatasan. Pemerintah Malaysia memberikan kesejahteraan yang cukup bagi masyarakatnya dengan menggratiskan pendidikan sampai SMA, fasilitas kesehatan gratis, dan memberikan tunjangan hidup bagi mereka yang sudah jompo. Penghasilan mereka juga lebih besar dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia di perbatasan. Kesenjangan secara ekonomi ini menyebabkan cukup banyak orang yang tinggal di perbatasan Indonesia memilih bekerja di negeri tetangga. Seperti menjadi buruh sawit di Malaysia bisa menghasilkan sekitar delapan juta rupiah per bulan sedangkan menjadi buruh sawit di Indonesia hanya mendapatkan tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ nya. Ini dikarenakan mata uang negara kita (rupiah) jika dikonversi dengan mata uang negara tetangga, Malaysia (ringgit) cukup jauh berbeda. Nilai 1 ringgit jika dikonversi akan berubah menjadi kurang lebih Rp 3.300.

Begitu pula yang dialami oleh masyarakat di Badau, Kalimantan Barat. Badau merupakan salah satu kecamatan di perbatasan yang berbatasan langsung

dengan wilayah Serawak, Malaysia. Badau beribukota di Nanga Badau yang berjarak kira-kira 15 menit dari Pasar Lubok Antu, Malaysia. Untuk mencapai Badau diperlukan perjalanan darat yang memakan waktu sekitar 23 jam dari Pontianak. Perjalanan ini bisa dipercepat dengan menaiki pesawat dari Pontianak-Kapuas Hulu, kira-kira 1 jam perjalanan dan dilanjutkan dengan menggunakan mobil/bis ke Badau yang memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan.

Jarak yang begitu dekat menyebabkan pusat perekonomian Badau bergantung pada Pasar Lubok Antu di Serawak, Malaysia. Ini dikarenakan jarak yang begitu jauh ke pusat kabupaten maupun pusat provinsi tidak memungkinkan pedagang di Badau mengambil barang dari Pontianak karena biaya transportasi yang begitu mahal dan juga mencegah kerusakan barang di jalan. Oleh karena itu, para pedagang lebih memilih untuk berbelanja di Pasar Lubok Antu, Malaysia dan menjalin hubungan perdagangan yang baik sehingga mereka mendapatkan bantuan modal dari pedagang besar di Malaysia.

Masyarakat Badau mengalami ketergantungan yang begitu besar kepada negaratetangga. Ini dikarenakan mayoritas kebutuhan masyarakat Badau dipenuhi oleh Malaysia, seperti listrik, gas, bensin, gula,

tepung, dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Oleh karena itu, hampir setiap minggu masyarakat Badau pergi ke Lubok Antu Malaysia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka.

Untuk melakukan transaksi jual beli, masyarakat Badau di Desa Badau masih menggunakan rupiah sebagai mata uang mereka meskipun tidak menolak ketika seseorang belanja menggunakan ringgit Malaysia. Akan tetapi ketika mereka belanja di Pasar Lubok Antu-Malaysia, mereka harus menukarkan uang mereka menjadi ringgit karena pedagang di Lubok Antu tidak menerima transaksi dengan menggunakan mata uang selain ringgit.

Tingkat ketergantungan masyarakat perbatasan, khususnya Badau, yang begitu tinggi ini kepada Malaysia secara tidak langsung menjadi nilai merah bagi pemerintah Indonesia. Bagaimana tidak, seharusnya kebutuhan masyarakat di perbatasan mampu dicukupi oleh produk-produk dari Indonesia dan untuk kendala biaya bisa disubsidi dari pemerintah, layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi pemerintah belum memusatkan perhatian kepada wilayah-wilayah perbatasan karena wilayah perbatasan hanya dianggap sebagai wilayah pinggiran. Padahal, jika *mindset* pemerintah diubah,

wilayah perbatasan bisa menjadi gambaran mengenaikondisi Indonesia.

Tulisan ini akan menceritakan bagaimana ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya di Desa Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat kepada negara tetangga mereka, Malaysia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan, seperti Kepala Desa, Kapolsek Badau, dan Danramil. Dari tokoh masyarakat diwawancarai *Penggawa*, *Temanggung*, dan penduduk yang terlibat langsung dalam proses sosial ekonomi, seperti mantan buruh di Malaysia, konsumen produk Malaysia, dan orang yang sering berinteraksi langsung kepada masyarakat Malaysia di Lubok Antu maupun di Badau. Data ini didukung dengan data sekunder yang bersifat angka dari data Kecamatan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara turjun langsung melakukan pengamatan ke masyarakat dan kemudian ikut menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, walaupun tetap mengambil jarak antara peneliti dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian secara objektif mengenai permasalahan

yang terjadi baik dari segi masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan melihat permasalahan dengan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku pendukung penelitian, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian maupun pada data-data yang dimiliki oleh pihak kecamatan seperti data monografi desa yang kemudian dianalisis bersama dengan data yang berkaitan dengan data yang didapatkan di lapangan.

Data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan dianalisis secara interpretif, yakni dengan menghubungkan data sebagai ekspresi dari sistem sosial, material, dan kosmologis masyarakat. Konteks yang melahirkan data merupakan sumber bagi pemahaman atas aspek-aspek yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan²

A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Badau

Secara teritorial kewilayahan Kecamatan Badau berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Empanang di sebelah barat, berbatasan dengan Distrik Lubok Antu, Sriaman, Negara Sarawak, Malaysia di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kecamatan Suhaid di sebelah

² Tulisan ini merupakan ringkasan tulisan dari skripsi Intan Permata Sari, 2013

selatan.³ Kecamatan Badau yang beribukota di Nanga Badau memiliki luas wilayah kurang lebih 700 km². Dengan demikian luas wilayah kecamatan Badau sudah meliputi 2,35% dari seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.⁴ Jarak antara Kecamatan Badau dengan ibukota Kabupaten, Putussibau cukup jauh, yaitu kurang lebih 177 km dengan infrastruktur yang masih serba kekurangan (Sari, 2013).

Untuk bisa mencapai Badau, ada beberapa cara, yakni menggunakan jalur darat maupun udara. Jalan darat bisa ditempuh melalui perjalanan dari Pontianak ke Putussibau dengan menggunakan bis umum selama 18 jam perjalanan. Biaya yang dikeluarkan untuk bisa mencapai Putussibau adalah Rp 250.000/ orang. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan bis Perintis dengan biaya Rp 100.000/ orang dengan perjalanan kira-kira memerlukan waktu lima jam perjalanan. Waktu tempuh yang cukup lama ini juga diakibatkan karena kondisi jalan yang masih memperhatikan. Masih banyak jalan raya yang masih belum beraspal atau masih berupa aspal rusak yang belum diperbaiki lagi oleh pemerintah. Selain itu, kita juga bisa menyewa mobil dari Pontianak

maupun dari Putussibau untuk sampai ke Badau.

Jika menyewa dari Pontianak, maka setiap orang harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp 500.000 dan menggunakan sistem sewa, sehingga mobil yang kita sewa bisa menetapkan harga sesuai dengan keinginannya. Harga yang baik bisa didapatkan dengan cara negosiasi kepada supir atau pemilik mobil⁵, sedangkan jika kita memilih menyewa mobil dari Putussibau ke Badau, dikarenakan kita menggunakan pesawat Express Air dari Pontianak-Putussibau, kita akan dikenail biaya Rp 200.000/orang. Akan tetapi biasanya mereka akan meminta sistem sewa dengan pembayaran Rp 800.000- Rp 1.000.000/ mobil. Pilihan terakhir adalah menggunakan bis Malaysia yang bisa diakses di terminal Pontianak. Bis yang ditumpangi adalah bis yang menuju Brunei yang melewati daerah yang berdekatan dengan Lubok Antu. Biaya yang dikeluarkan lebih murah, yaitu Rp 200.000/ orang dan membutuhkan waktu lebih cepat kira-kira sembilan jam perjalanan karena menggunakan jalan lain.

Dari Pontianak dapat juga digunakan jalur udara ke Kuching. Setelah sampai Kuching, kita bisa naik bis yang menuju arah Lubok Antu atau menyewa mobil dari

³Data dari Profil Singkat Kecamatan Badau Tahun 2012

⁴ Untuk informasi lebih rinci, lihat Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu dalam Profil Singkat Kecamatan Badau, Tahun 2012.

⁵ Supir biasanya merangkap pemilik mobil yang terhubung dengan penyewaan-penyewaan mobil

Malaysia untuk bisa sampai ke Badau. Jarak dari Kuching ke Malaysia kira-kira tiga jam perjalanan. Akan tetapi, perjalanan menggunakan udara jarang sekali digunakan oleh penduduk karena mayoritas dari mereka belum memiliki paspor⁶ yang tentu saja harus melewati birokrasi yang lebih panjang. Pada umumnya

Masyarakat Badau mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Mayoritas dari mereka berdagang di wilayah simpang empat, yang merupakan pusat ekonomi wilayah. Wilayah simpang empat adalah wilayah yang paling strategis sebagai pusat ekonomi karena simpang empat merupakan jalan utama yang pasti dilalui oleh masyarakat Badau. Posisi simpang empat tidak hanya memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat Badau tetapi memberikan keuntungan yang sangat besar kepada masyarakat Jawa. Banyak sekali toko dan warung makan di sekitar wilayah simpang empat yang merupakan milik masyarakat Jawa, Mereka adalah pendatang yang mencoba peruntungan di wilayah utara Kalimantan Barat ini.

Selain itu, masyarakat Badau sekitar 20% berprofesi sebagai petani. Profesi ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Iban karena mereka memiliki tanah yang sangat luas, warisan dari nenek moyangnya.

⁶ Mengurus paspor tidak bisa di Badau karena hanya di Badau hanya ada imigrasi tipe C. Membuat paspor harus ke Pontianak

Jenis pertanian yang sering kali mereka lakukan adalah bertani karet. Jenis pekerjaan ini cukup mudah dilakukan dan jumlah pendapatannya juga bisa dikatakan lumayan. Sejak dibukanya perusahaan sawit di wilayah Badau, sekitar 100 orang masyarakat Badau bekerja di perusahaan ini. Mereka umumnya adalah masyarakat pendatang. Masyarakat yang sudah lama tinggal di wilayah Badau, seperti masyarakat Iban dan Melayu, tidak tertarik untuk bekerja di sawit karena gajinya yang terlampau kecil untuk mereka, yaitu Rp 50.000/ hari. Uang sebesar itu tidak bisa mencukupi biaya kehidupan di Badau. Selain itu, ada pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, tetapi jumlahnya sangat kecil, kurang lebih lima belas orang⁷.

B. Badau sebagai Konstruksi Sosial-Ekonomi

Badau sebagai wilayah yang sangat strategis menjadikannya sasaran kapitalisme. Tidak hanya posisinya yang sangat berdekatan dengan Malaysia, wilayah ini juga menarik karena mulai berkembang sejak masuknya perusahaan sawit yang menyerap banyak tenaga kerja terutama dari Jawa dan juga dari NTT. Hadirnya perusahaan sawit membangkitkan kembali kegiatan perekonomian yang mulai

⁷ Data diambil dari hasil wawancara kepada salah satu pejabat Desa

vakum. Jumlah pendatang yang banyak, tentu saja membuat uang mulai mudah beredar. Muncul banyak toko-toko, warung makan, bahkan beberapa orang mulai membuka usaha pada sektor jasa seperti usaha laundry, taksi, bis, bengkel dan lain sebagainya. Akan tetapi, cerita berkembangnya masyarakat Badau sehingga menjadi sasaran kapitalisme tidak lah bermula dari datangnya perusahaan sawit. Sebelum adanya perusahaan sawit ini, sudah ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan penduduk agar mereka bisa membuat perusahaan kakao dengan melibatkan warga. Perusahaan ini meminta bantuan masyarakat untuk memberikan tanah mereka agar bisa ditumbuhi tanaman coklat.

Masyarakat yang pada saat itu, termakan janji-janji manis perusahaan akan keuntungan yang akan didapatkan dari kerjasama ini, dengan rela memberikan tanah mereka untuk ditanami coklat. Akan tetapi ternyata masyarakat ditipu. Niat utama perusahaan sebenarnya adalah mengambil semua kayu yang dimiliki oleh masyarakat. Setelah kayu-kayu mereka habis ditebang, perusahaan meninggalkan begitu saja lahan-lahan yang sudah gundul. Masyarakat sangat kecewa dan merasa sangat dibohongi karena pohon-pohon mereka sudah habis ditebang dan mereka tidak mendapat apapun. Kasus *illegal logging*

ini tidak hanya melibatkan perusahaan saja, ternyata perusahaan juga melibatkan masyarakat Badau untuk ikut serta dalam *illegal logging*. Pada masa itu gampang sekali mencari uang karena kayu-kayu hasil *illegal logging* tersebut langsung dijual ke Malaysia dan digantikan dengan lembaran-lembaran ringgit yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan sempat ada cerita bahwa pada waktu itu uang satu miliar bukanlah uang yang banyak bagi masyarakat Badau.

Efek tidak percaya kepada perusahaan yang ingin masuk ke wilayahnya, sampai sekarang masih membekas di hati masyarakat Badau terutama pemilik lahan. Misalnya saja ketika perusahaan sawit ingin masuk ke wilayah mereka, pihak perusahaan cukup sulit meyakinkan masyarakat untuk memberikan sebagian lahannya untuk diajak berbisnis sawit. Akan tetapi pihak perusahaan tidak menyerah. Mereka pelan-pelan menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat dengan cara mulai merangkul masyarakat sedikit demi sedikit sebagai bagian dari mereka. Masyarakat Badau mulai diberi pekerjaan, perusahaan membantu rumah adat Dayak yang pada waktu itu terbakar, dan berbagai cara lainnya sehingga menarik simpati masyarakat. Lambat laun masyarakat mulai percaya kepada perusahaan ini dan mulai membuka diri untuk menerima bahkan

bekerja sama untuk menanami lahan mereka dengan sawit yang diolah oleh pihak perusahaan dengan diawasi langsung oleh masyarakat.

C. Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Badau-Lubok Antu

Mobilitas penduduk Badau ke Malaysia maupun sebaliknya memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kedekatan jarak kedua wilayah, persamaan budaya, dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan mulai dari barang dan jasa, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai daerah yang berbatasan langsung secara darat dan bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor dengan waktu 15 menit, membuat hubungan keduanya sangat baik dan saling bergantung. Akan tetapi, kondisi ketergantungan lebih sering dialami oleh masyarakat Badau karena mau tidak mau mereka harus membeli produk dari Malaysia karena jika menunggu barang dari Indonesia akan terlalu lama dan memakan biaya yang lebih besar sehingga tidak ada pilihan lain selain memasok barang kebutuhan dari pasar Lubok Antu. Pasar Lubok Antu merupakan tempat paling penting di antara dua negara ini karena di sinilah tempat bertemunya perdagangan Malaysia dengan pembeli dari Indonesia. Perkenalan yang dilakukan secara tidak sengaja antara penjual dan pembeli inilah

yang menyebabkan hubungan mereka cukup baik dan saling mengenal satu sama lain.

Hubungan Indonesia dan Malaysia yang begitu dekat ternyata tidak sebatas urusan ekonomi saja. Mereka juga memiliki kedekatan personal yang memberikan keuntungan tersendiri.

“Saya saja buka warung modal awalnya dipinjami dari Toke Malaysia. Kami sering ketemu jadi dia udah percaya dan memberikan saya modal barang, kalau udah laku baru bayar. Gak kayak orang kita, gak percayaan. Tiap bentar ditelpon kapan bayar. Kalau Toke Malaysia percaya sama kami.” (bude, pedagang di pasar Badau).

Pernyataan itu sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin mereka hanya terikat hubungan personal (saling kenal karena sering bertemu di pasar Lubok Antu) akan tetapi *toke* Malaysia itu sudah menaruh kepercayaan yang begitu tinggi kepada pedagang Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penarik bagi pedagang Indonesia untuk bergantung pada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pedagang-pedangan dari Malaysia. Kemudahan dan kepercayaan ini kemudian menghasilkan merasa nyaman dan tenang dalam berdagang karena tidak diburu untuk membayar hutang. Setiap dua kali dalam seminggu, pedagang Indonesia mengambil

barang dari Malaysia dengan cara diantar langsung ke tempatnya berdagang. Kemudahan-kemudahan ini membuat pedagang Indonesia terbuka dengan barang-barang Malaysia dibandingkan dengan produk-produk dari dalam negeri.

Selain itu, saya juga menemukan sebuah toko milik warga negara Malaysia di Badau. Pemilik toko ini mengisi sebagian barang-barang di tokonya dengan barang produk dari Malaysia. Kasus warga Malaysia mencari nafkah di Negara Indonesia tidak hanya pada kasus toko saja, tetapi ada juga warga Malaysia yang membuka usaha peralatan kendaraan roda empat yang barang-barangnya didapatkan dari Malaysia. Untuk usaha seperti ini, mereka memanfaatkan status mereka sebagai warga Negara Malaysia untuk bisa mendapat kemudahan dalam memperoleh barang yang mereka inginkan sehingga bisa dijual di Indonesia dengan harga yang cukup tinggi.

Dalam kebutuhan sehari-hari, Malaysia memegang peranan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Badau. Ini dikarenakan Malaysia merupakan pemasok utama berbagai barang-barang vital seperti beras, minyak goreng, tepung, gula, telur, buah-buahan, ayam, ikan, dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Barang-barang

ini dipasok dari Malaysia dikarenakan mutu yang ditawarkan jauh lebih baik dan harganya tidak berbeda jauh dengan barang dari Indonesia bahkan terkadang lebih murah untuk beberapa barang yang sudah disubsidi oleh pemerintah Malaysia.

Banyaknya barang Malaysia yang beredar di Indonesia membuat pengaruh Malaysia cukup besar dan masyarakat Badau seperti bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia karena kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia akan mempengaruhi kehidupan mereka juga. Misalnya saja kebijakan untuk bisa membawa barang dagangan dari Malaysia ke Indonesia dengan tidak dikenai bea cukai jika membawa barang belanjaan paling banyak 600 RM. Barang belanjaan senilai 300 RM dianggap wajar sebagai jumlah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Badau. Kebijakan pemerintah Malaysia ini hanya berlaku di Badau. Barang-barang Malaysia tidak boleh keluar dari Badau akan tetapi pada kenyataannya hal seperti itu tidak bisa dicegah. Daerah-daerah di luar Badau yang sebenarnya masih cukup dekat dengan Badau masih bisa mendapatkan barang milik Malaysia dengan cara membelinya dari Badau.

Bukan hanya itu, kebutuhan masyarakat Badau untuk listrik saja

ternyata tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat suatu kerjasama di mana pemerintah Malaysia bersedia memberikan bantuan listrik kepada pemerintah Indonesia. Di desa ini sebenarnya sudah ada PLN tetapi listrik yang dihasilkan oleh PLN Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Badau yang kian hari kian banyak. Oleh karena itu, kekurangan ini ditutupi oleh bantuan Malaysia. Meskipun pemerintah Malaysia sudah turun tangan untuk memberikan bantuan listrik kepada masyarakat perbatasan, tetapi buktinya pemadaman listrik masih saja terjadi dan bahkan diadakan pemadaman bergilir yang jadwalnya sudah diberikan PLN kepada masyarakat.

Hal serupa juga terjadi untuk konsumsi bensin, gas, dan air mineral. Pemerintah Indonesia masih bergantung pada barang-barang yang diekspor Malaysia untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga bensin Malaysia sangat mahal yaitu Rp 8.500-Rp 9.500/ liter. Harga bensin tidak pasti, tergantung di warung mana kita membeli bensin. Bensin yang dijual kepada masyarakat sebenarnya bukanlah bensin yang disetujui oleh pemerintah Malaysia. Bensin-bensin ini adalah barang ilegal yang diselundupkan

melalui jalan-jalan tikus atau jalan sawit yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia.

Tidak hanya bensin, barang-barang dari Malaysia yang mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia yang kemudian diperjualbelikan di Badau juga merupakan barang ilegal karena mereka tidak melalui bea cukai di Pos Lintas Batas (PLB). Akan tetapi pembelian barang dari pasar Lubok Antu kemudian di bawa ke Indonesia sebenarnya diperbolehkan asal tidak melebihi 600 RM, jika melebihi maka mereka harus membayar pajak bea cukai. Selain itu, hal vital lainnya yang didapatkan dari Malaysia adalah gas dan air mineral. Kedua barang ini diperjualbelikan karena jika menunggu barang dari Pontianak maka akan sangat lama dan harga sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat Badau.

Beralih dari kebutuhan pokok, ternyata Malaysia juga memberikan pengaruhnya kepada barang-barang mewah yang bisa menjadi status untuk orang yang memilikinya. Di Badau, banyak sekali terlihat mobil dengan plat Malaysia atau tidak memiliki plat, hilir mudik Indonesia-Malaysia. Di Badau memang jauh lebih mudah memperoleh mobil Malaysia daripada membeli mobil Indonesia. Ini dikarenakan mobil di Malaysia jauh lebih

murah dibandingkan mobil di Indonesia. Bahkan untuk mobil bekas sekelas ‘mobil kancil’ buatan Malaysia, kita bisa memperoleh dengan harga Rp 8.000.000, harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga motor baru yang dibeli di Indonesia. Akan tetapi lagi-lagi barang ini adalah barang ilegal. Mobil warga Malaysia yang dicuri atau dibawa lari ke Indonesia untuk menghilangkan jejak. Mobil-mobil seperti ini memang sengaja dijual murah oleh masyarakat Malaysia. Tindakan ini tentu saja memberikan dampak buruk kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat kita dikenal sebagai pencuri oleh masyarakat Malaysia, padahal itu semua tidak benar tetapi karena barang bukti itu berada di Indonesia maka masyarakat Badau langsung menjadi tertuduh

Besarnya pengaruh pasar Lubok Antu tidak hanya karena keterbatasan pemerintah Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya tetapi ada alasan lain yang lebih mendasar adalah mutu barang Malaysia lebih bagus. Beberapa barang seperti gula, garam, tepung, dan lain sebagainya mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga lebih murah harganya. Harga yang murah dibandingkan harga Indonesia, tidak membuat mutu dari barang Malaysia itu lebih rendah. Banyak komentar yang menyatakan bahwa barang Malaysia jauh lebih berkualitas

dibandingkan produk Indonesia. Hal ini tampaknya sudah menjadi pengetahuan dan kesepahaman publik di Badau.

“Barang Malaysia itu lebih bagus mutunya, pengemasannya juga lebih rapi, gak kayak barang Indonesia. Kami lebih suka beli barang Malaysia karena kualitasnya lebih terjamin.”(Ibu R, salah satu pembeli di pasar Badau)

Beberapa warga yang ditemui juga berpendapat sama, bahkan beberapa dari mereka ketika disuruh memilih barang Indonesia atau Malaysia, mereka cenderung memilih barang Malaysia walaupun ada yang bersikap netral. Beberapa dari mereka juga bercerita secara terbuka tentang berbagai barang yang masuk ke wilayah ini dan tidak segan mereka membandingkannya dengan kualitas dan harga barang Indonesia yang melambung tinggi ketika sampai di perbatasan. Tidak sebanding rasanya jika dibandingkan dengan barang Malaysia yang harganya tidak jauh berbeda dan masih segar: “Mau gimana lagi, barang Indonesia mahal dan juga untuk barang-barang tertentu kalau udah sampai sini sudah jelek, kan lama kalo dari Pontianak.” (Bude, salah satu penjual di pasar Badau).

Bagi beberapa pedagang, pengaruh Malaysia sangat terasa. Mereka seolah berterima kasih kepada negeri tetangga ini

karena telah memberikan mereka keuntungan penjualan yang cukup banyak. “Gak sanggup beli barang Indonesia, terlalu mahal.” Pernyataan mereka itu memang benar adanya, saat dibandingkan harga tepung Indonesia dan Malaysia, harganya sama Rp 8.000 tetapi untuk ukuran yang berbeda, 1 kilogram untuk tepung Malaysia dan ½ kilogram untuk tepung Indonesia. Perbedaannya cukup jauh dan membuat beberapa pembeli tidak berpikir lama untuk memilih tepung Malaysia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata untuk barang-barang pokok seperti tepung, minyak, dan gula pemerintah Malaysia memberikan subsidi kepada masyarakatnya sehingga harganya tidak begitu mahal dan barang-barang seperti itu dijual di Badau secara ilegal dan bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Badau. Fenomena seperti ini sudah berjalan cukup lama dan hanya bisa dibiarkan saja tetapi mulai sedikit tertib sejak adanya Pos Lintas Batas (PLB).

Sebenarnya tidak hanya masyarakat Badau yang bergantung kepada Malaysia tetapi juga warga Malaysia juga bergantung pada barang-barang dari Indonesia. Dengan mudah dapat ditemukan beberapa barang milik Indonesia yang beredar di pasar Lubok Antu, misalnya sampo, sabun, kopi instan, dan lain sebagainya. Selain itu, pedagang Malaysia di Lubok Antu juga

memiliki kerjasama dengan pedagang Badau, pedagang Indonesia ini menjual barang yang dia hasilkan kepada pedagang Malaysia kemudian dipasarkan dengan harga Malaysia. Misalnya saja adalah makanan khas Kapuas Hulu, yakni kerupuk basah. Makanan ini sengaja dijual oleh beberapa masyarakat Badau ke Malaysia karena harganya yang jauh lebih mahal.

Di Badau, satu buah kerupuk basah dijual dengan harga Rp 10.000 tetapi jika menjualnya ke Malaysia maka uang yang akan didapat sebesar 5 RM (sekitar Rp 16.000). Perbedaan harga seperti inilah yang menjadi daya tarik pedagang Indonesia untuk menjual hasil dagangannya kepada pedagang Malaysia daripada di pasok sendiri ke wilayahnya.

Selain itu, barang yang seringkali diperjualbelikan adalah peralatan upacara adat, seperti baju adat, perhiasan adat, dan lain sebagainya. Peralatan upacara adat ini adalah milik masyarakat Iban yang selalu dipergunakan untuk upacara-upacara tertentu. Beberapa masyarakat Badau pandai membuat barang-barang kerajinan tersebut. Mereka menjual hasil karyanya kepada pedagang Malaysia karena pedagang ini sudah memiliki toko untuk memasarkan hasil karya masyarakat Indonesia. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah hasil kebudayaan

seperti ini, bagi orang *awam* adalah produk dari Malaysia. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa barang ini adalah buatan negeri sendiri karena dipasarkan di Lubok Antu.

Meskipun Malaysia memberikan pesona luar biasa bagi masyarakat Indonesia diperbatasan, bukan berarti semua tentang Malaysia menjadi baik dan menarik. Seperti beberapa kisah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak betah bekerja di negeri orang. Fenomena seperti ini juga kadang kala terjadi di wilayah Lubok Antu dan sekitarnya. Kadang kala terdengar cerita penyiksaan pembantu atau pekerja di wilayah ini. Akan tetapi pekerja yang disiksa pasti bukanlah orang Badau, mereka adalah para pendatang atau pencari kerja dari wilayah lain di Indonesia.

Para pekerja ini kadang tidak dibayar setiap bulan karena periode pembayarannya tergantung pada pemilik toko atau rumah. Mereka memilih tidak membayarkan gaji para pekerjanya dengan alasan untuk mengikat mereka agar tidak kabur atau meminta pulang ke kampung. Sering kali banyak orang yang tidak betah bekerja kepada toko Malaysia⁸ karena mereka sangat disiplin dan selalu bekerja tanpa mengenal istirahat. Beberapa keluhan datang karena mereka tidak mendapatkan

istirahat yang cukup terutama ketika barang-barang dari toko datang. Mereka harus bekerja lembur, siang dan malam tanpa pernah melihat uang gaji mereka jika belum masanya. Meskipun begitu, kebutuhan mereka tetap dipenuhi, misalnya makan, rokok, dan tempat tinggal. Akan tetapi itu belum cukup karena keluarganya yang ada di kampung selalu menunggu saat-saat mereka gajian untuk biaya hidup di kampung.

Ada banyak cerita mengenai para pekerja di Malaysia, khususnya Lubok Antu. Keterbatasan bahasa yang bisa dipahami oleh pekerja, perbedaan budaya yang terlalu mencolok, dan kesewenang-wenangan pemilik toko kepada pekerjanya memang menjadi faktor utama ketidakbetahan mereka bekerja di wilayah ini. Sering kali mereka berpikiran untuk kabur dan melupakan gaji mereka yang ditahan oleh 'si bos'. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena pengawasan yang cukup ketat dan juga identitas diri mereka (passor) ditahan oleh sang majikan. Mereka terkadang putus asa dan meminta masyarakat Badau yang datang ke toko tempatnya bekerja untuk mengajaknya kabur. Akan tetapi apa daya? Masyarakat Badau pun malas berurusan dan mencari masalah dengan toko Malaysia ini. Mereka tentu tidak ingin dilarang

⁸ Biasanya toko pemilik toko, etnis Tionghoa

berbelanja lagi di toko sang *toke*. Meskipun terkadang rasa iba datang menyerang tetapi mereka hanya diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Terkadang ketika mereka datang ke toko tersebut, sang *toke* menanyakan keberadaan pekerjanya itu karena ternyata mereka sudah kabur melewati hutan-hutan yang memberikan mereka jalan untuk sampai ke Indonesia.

Penutup

Tawaran menjadi warga negara Malaysia yang seringkali menjadi godaan bagi masyarakat Indonesia di perbatasan. Apalagi ketika mereka membandingkan perlakuan pemerintah Indonesia yang berbeda jauh dengan perhatian pemerintah Malaysia kepada masyarakatnya di perbatasan. Ditambah lagi ketergantungan mereka yang begitu tinggi kepada Malaysia menyebabkan dilematis yang tidak berkesudahan. Ada banyak orang yang memilih berkewarganegaraan ganda agar bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Malaysia tetapi tetap tinggal dan menjadi warga negara Indonesia.

Di balik keputusan itu, ternyata masih cukup banyak orang di perbatasan, yang bertahan menjadi warga negara Indonesia dan menikmati baik-buruknya fasilitas yang diberikan negara kepada mereka. Kecintaannya kepada negara Indonesia menyebabkan mereka memilih

tetap menjadi warga negara Indonesia. Jiwa-jiwa yang penuh rasa nasionalisme seharusnya menjadi semangat baru bagi pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan warganya yang berada di perbatasan. Pelan-pelan pemerintah sebaiknya mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia di perbatasan dengan negara tetangga dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai salah satu fokus pembangunan negara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2013. "Daerah Perbatasan: Misrepresentasi Pembangunan dari Belakang", dalam Irwan Abdullah (ed.), *Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Yogyakarta: TICI Publications.
- Ardhana, I Ketut. 2006. *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah: Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia*. Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu dalam Profil Singkat Kecamatan Badau, Tahun 2012.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. 2013. "Badauku Sayang Badauku Malang: Dinamika

Daerah Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak”, dalam Irwan Abdullah (ed.), *Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Yogyakarta: TICI Publications.

Profil Singkat Kecamatan Badau Tahun 2012

Safitri, Ririh Megah. 2013. “Fungsi dan Disfungsi Negara di Perbatasan: Potret Kehidupan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat”, dalam Irwan Abdullah (ed.), *Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Yogyakarta: TICI Publications.

Sari, Intan Permata. 2013. “Konstruksi Identitas Komunitas Perbatasan : Perebutan Simbol Negara-Bangsa di Desa Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

-----, 2013. “Sulitnya Menjadi Indonesia: Dilema Identitas Komunitas Perbatasan Badau, Kalimantan Barat”, dalam Irwan Abdullah (ed.), *Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Yogyakarta: TICI Publications.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2005. “Wilayah Perbatasan dan Tantangan Abad 21: Sebuah Pengantar”, dalam Riwanto Tirtosudarmo, dkk. *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.